

Lokakarya Optimalisasi Media Sosial Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Azhari Amri, S.Sn., M.Ds.¹, Topan Dewa Gugat, S.Sn., M.Sn.²,

¹Program Studi Desain Media, Politeknik Bina Madani (Azhari Amri, S.Sn., M.Ds)

² Program Studi Desain Media, Politeknik Bina (Topan Dewa Gugat, S.Sn., M.Sn)

Diterima : 13/01/2022

Revisi : 28/01/2022

Diterbitkan : 05/02/2022

Abstrak. Instansi Pemerintah di era modern ini sangat terbantu dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi. Adanya internet membuat jarak dan waktu menjadi tidak berarti. Transparansi dan kecepatan menjadi keharusan dalam memberikan layanan kepada masyarakat dengan tidak melupakan akuntabilitas kinerja. Internet menjadi salah satu sarana bagi Instansi Pemerintah untuk memberikan layanan yang cepat dan mudah, internet juga membuat rakyat lebih aktif mengawasi jalannya layanan publik. Pemanfaatan media sosial oleh instansi pemerintah merupakan salah satu inovasi dengan memaksimalkan teknologi. Dalam buku "Memaksimalkan Penggunaan Media Sosial Dalam Lembaga Pemerintah" yang disusun oleh Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika, dipaparkan beberapa manfaat media sosial bagi pemerintah, yaitu (1) Mendorong efisiensi pemerintahan, (2) Memulihkan kepercayaan masyarakat yang turun, (3) Menghadapi perkembangan jaman, (4) Sarana komunikasi di saat krisis dan bencana alam.

Kata kunci: Media Sosial, Lokakarya, Optimalisasi

Abstract. Government agencies in this modern era are greatly assisted by the rapid development of information technology. The existence of the internet makes distance and time meaningless. Transparency and speed are imperative in providing services to the public by not forgetting performance accountability. The internet has become a means for government agencies to provide fast and easy services, the internet has also made people more active in overseeing the running of public services. The use of social media by government agencies is one of the innovations by maximizing technology. In the book "Maximizing the Use of Social Media in Government Institutions" compiled by the Directorate General of Information and Public Communication, Ministry of Communication and Informatics, some of the benefits of social media for the government are described, namely (1) Encouraging government efficiency, (2) Restoring declining public trust, (3) Facing changing times, (4) Means of communication during crises and natural disasters.

Keywords: Social Media, Workshops, Optimization

Correspondence author: Name, E-mail, City, and Country



This work is licensed under a CC-BY

Pendahuluan

A. Analisis Situasi

Instansi Pemerintah di era modern ini sangat terbantu dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi. Adanya internet membuat jarak dan waktu menjadi tidak berarti. Transparansi dan kecepatan menjadi keharusan dalam memberikan layanan kepada masyarakat dengan tidak melupakan akuntabilitas kinerja. Internet menjadi salah satu sarana bagi Instansi Pemerintah untuk memberikan layanan yang cepat dan mudah, internet juga membuat rakyat lebih aktif mengawasi jalannya layanan publik.

Pemanfaatan media sosial oleh instansi pemerintah merupakan salah satu inovasi dengan memaksimalkan teknologi. Dalam buku “ Memaksimalkan Penggunaan Media Sosial Dalam Lembaga Pemerintah” yang disusun oleh Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika, dipaparkan beberapa manfaat media sosial bagi pemerintah, yaitu :

1. Mendorong efisiensi pemerintahan, penggunaan media sosial dapat menjangkau masyarakat dengan lebih luas dan cepat. Media sosial dengan teknologi *Artificial Intelligent* (kecerdasan buatan) dapat digunakan untuk membantu proses analisa data.
2. Memulihkan kepercayaan masyarakat yang turun, di era keterbukaan seperti saat ini, masyarakat banyak mendapatkan informasi dari media sosial seperti whatsapp group atau komunitas di Facebook. Maraknya *hoax* dapat menimbulkan rasa tidak percaya. Media sosial dapat menjadi solusi karena dapat menjangkau khalayak secara lebih personal dan komunikatif.
3. Menghadapi perkembangan jaman, instansi Pemerintah saat ini menghadapi tantangan tertentu berupa penghematan anggaran, menuanya staf yang dimiliki, dan birokrasi yang dapat menghalangi kemajuan. Tantangan ini dapat diatasi dengan mempersiapkan perencanaan dapat mengatasi masalah di kemudian hari.
4. Sarana komunikasi di saat krisis dan bencana alam, seperti saat pandemik sekarang ini keharusan jaga jarak ketika berinteraksi membuat interaksi lebih

banyak dilakukan melalui media sosial. Bagi instansi pemerintah, media sosial harus memainkan peran yang jelas dalam strategi komunikasi krisis.

Menurut data yang dipublikasi oleh laman katadata.co.id, Youtube menjadi *platform* yang paling sering digunakan pengguna media sosial di Indonesia berusia 16 hingga 64 tahun. Persentase pengguna yang mengakses Youtube mencapai 88%. Media sosial yang paling sering diakses selanjutnya adalah WhatsApp sebesar 84%, Facebook sebesar 82%, dan Instagram 79%.

Sebagai informasi, rata-rata waktu yang dihabiskan masyarakat Indonesia untuk mengakses media sosial selama 3 jam 26 menit. Total pengguna aktif sosial media sebanyak 160 juta atau 59% dari total penduduk Indonesia. dan 99% pengguna media sosial berselancar melalui ponsel.

Dalam mengelola media sosial, Instansi Pemerintah harus memiliki prinsip dan etika yang berbeda dengan pengelolaan media sosial untuk pribadi. Pedoman Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintah yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 83 Tahun 2012 mengatur beberapa prinsip dan etika yang perlu diperhatikan oleh pengelola media sosial di Instansi Pemerintah, yaitu :

1. kredibel, yakni menjaga kredibilitas sehingga informasi yang disampaikan akurat, berimbang, dan keterwakilan;
2. integritas, yakni menunjukkan sikap jujur dan menjaga etika;
3. profesional, yakni memiliki pendidikan, keahlian, dan keterampilan di bidangnya;
4. responsif, yakni menanggapi masukan dengan cepat dan tepat;
5. terintegrasi, yakni menyelaraskan penggunaan media sosial dengan media komunikasi lainnya, baik yang berbasis internet (*on-line*) maupun yang tidak berbasis internet (*off-line*);
6. keterwakilan, yakni pesan yang disampaikan mewakili kepentingan instansi pemerintah, bukan kepentingan pribadi.

Sedangkan etika yang perlu ditegakkan yaitu :

1. menjunjung tinggi kehormatan instansi pemerintah;
2. memiliki keahlian, kompetensi, objektivitas, kejujuran, dan integritas;
3. menjaga rahasia negara dan melaksanakan sumpah jabatan;

4. menegakkan etika yang berlaku agar tercipta citra dan reputasi instansi pemerintah;
5. menghormati kode etik pegawai negeri;
6. menyampaikan dan menerima informasi publik yang benar, tepat, dan akurat;
7. menghargai, menghormati, dan membina solidaritas serta nama baik instansi dan perorangan;
8. melaksanakan keterbukaan informasi publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk mengoptimalikan penggunaan media sosial oleh Instansi Pemerintah, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Dukungan dari organisasi terutama yang mendukung perubahan pola komunikasi dan budaya organisasi yang sesuai dengan karakteristik dunia maya terutama di media sosial yang lebih terbuka dan fleksibel. Media sosial Instansi Pemerintah harus dapat memberikan respon lebih cepat daripada layanan *offline*, apalagi saat ini banyak pengguna lebih kritis terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh Instansi Pemerintah.
2. Kualifikasi Pengelola Media Sosial. Pengelola media sosial memerlukan kemampuan khusus, antara lain kemampuan berkomunikasi secara interaktif dengan *netizen/follower*, kemampuan menggunakan aplikasi olah gambar untuk membuat konten-konten media sosial. Perlu diberikan pelatihan kepada pengelola media sosial di Instansi Pemerintah yang diberikan tugas mengurus media sosial.
3. Sumber informasi. Jadikan setiap postingan yang dibagikan di media sosial mudah dipahami agar mendapat perhatian dan respon dari *netizen/follower*. Media sosial mempermudah Instansi Pemerintah menyebarkan informasi, dengan tetap memperhatikan prinsip dan etika organisasi.

Pada masa ini sudah saatnya Instansi Pemerintah mengelola media sosialnya dengan terencana dan terukur. Dengan kemudahan-kemudahan yang ada di *platform* media sosial, diharapkan dapat menjadi representasi negara dan Instansi dalam menyajikan layanan kepada masyarakat menjadi lebih baik.

B. Permasalahan Mitra

Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berlokasi di Jl. Raden Patah No 1, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Gedung Ex Kemenpera Lantai 2 Wing 1.



Gambar 1
Gedung Kementerian PUPR

Dalam penyelenggaraannya, Instansi Pemerintah di era modern ini sangat terbantu dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi. Adanya internet membuat jarak dan waktu menjadi tidak berarti. Transparansi dan kecepatan menjadi keharusan dalam memberikan layanan kepada masyarakat dengan tidak melupakan akuntabilitas kinerja. Internet menjadi salah satu sarana bagi Instansi Pemerintah untuk memberikan

layanan yang cepat dan mudah, internet juga membuat rakyat lebih aktif mengawasi jalannya layanan publik.

Pemanfaatan media sosial oleh instansi pemerintah merupakan salah satu inovasi dengan memaksimalkan teknologi. Dalam buku " Memaksimalkan Penggunaan Media Sosial Dalam Lembaga Pemerintah" yang disusun oleh Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika, dipaparkan beberapa manfaat media sosial bagi pemerintah, yaitu (1) Mendorong efisiensi pemerintahan, (2) Memulihkan kepercayaan masyarakat yang turun, (3) Menghadapi perkembangan jaman, (4) Sarana komunikasi di saat krisis dan bencana alam

Dengan menetapkan hal tersebut, bagian hukum dan komunikasi publik menempatkan media sosial sebagai media informasi yang mampu menerangkan pembiayaan perumahan secara kompleks, mulai dari konten produk hukum, prosedur teknis, hingga layanan informasi ke beberapa mitra terkait.

Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan yang akan ditetapkan dalam program kemitraan masyarakat ini dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu:

1. Metode pelaksanaan PKM ini yang pertama adalah melakukan evaluasi pada mitra. Hal ini dilakukan untuk mengidentifikasi keperluan konten media sosial yang akan dilakukan oleh Ditjen Pembinaan Perumahan, Bagian Hukum dan Komunikasi Publik.
2. Menyusun materi konten video skesa dan video recap terkait beragamnya model program pembiayaan infrastruktur dan peraturan skema pembiayaan infrastruktur.
3. Langkah selanjutnya adalah melakukan proses simulasi merancang video skesa dan video recap sebagai panduan bagi para peserta lokakarya optimasi media sosial sebagai medium informasi bagi Ditjen Pembiayaan Infrastruktur, terutama Bagian Hukum dan Komunikasi Publik.
4. Pada kegiatan ini ialah melakukan penyampaian materi lokakarya optimasi media sosial sebagai medium informasi Ditjen Pembinaan Perumahan, Bagian Hukum dan Komunikasi Publik, Kementerian PUPR, kepada pihak mitra dan masyarakat.

Hasil dan Pembahasan

A. Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat

Kebutuhan yang sudah dilakukan, diantaranya (1) Diperlukannya dukungan media edukasi berbasis video pendek seperti sketsa cerita yang memaparkan tentang informasi pembiayaan infrastruktur dan perumahan. (2) Diperlukannya tema-tema konten video pendek yang lebih menghibur dan mengedukasi.



Gambar 5.1

Dokumentasi Kegiatan
(Sumber, Dokumen Pribadi)



Gambar 5.2
Dokumentasi Kegiatan
(Sumber, Dokumen
Pribadi)

B. Luaran yang dicapai

Luaran dari Pengabdian Masyarakat ini adalah berupa rekomendasi evaluasi konten yang mengidentifikasi konten apa saja yang dapat di rancang sebagai medium informasi Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Kementerian PUPR. Selain rekomendasi tersebut, materi optimasi dapat dijadikan sebagai pedoman penyusunan konten video pendek sebagai medium informasi bagi sosialisasi pembiayaan perumahan.

SIMPULAN

A. Kesimpulan

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan oleh pengusul secara sendiri dan mandiri yang telah dilaksanakan oleh Azhari Amri, S.Sn., M.Ds. yang memiliki kompetensi di bidang Desain Komunikasi Visual khususnya Multimedia. Luaran dari Pengabdian Masyarakat ini adalah evaluasi konten yang mengidentifikasi konten apa saja yang dapat di rancang sebagai medium informasi Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Kementerian PUPR. Selain rekomendasi tersebut, materi optimasi dapat dijadikan sebagai pedoman penyusunan konten video pendek sebagai medium informasi bagi sosialisasi pembiayaan perumahan.

B. Saran

(1) Diperlukannya dukungan media edukasi berbasis video pendek seperti sketsa cerita yang memaparkan tentang informasi pembiayaan infrastruktur dan perumahan. (2) Diperlukannya tema-tema konten video pendek yang lebih menghibur dan mengedukasi.

Ucapan Terima Kasih

Terimakasih kepada Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Ditjen Pembiayaan Infrastruktur yang telah mendukung penuh pengabdian masyarakat ini. Setelah itu terimakasih kepada Direktur Politeknik Bina Madani dan jajaran staf Politeknik Bina Madani telah turut membantu dan mensukseskan lokakarya ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Amri, Azhari. 2013. Model Penelitian Desain Komunikasi Visual. Jakarta: Cipta Caraka Nusantara.pt

Pedoman Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintah yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2012.

Memaksimalkan Penggunaan Media Sosial dalam Lembaga Pemerintah disusun oleh Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.

Internet

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-jakarta/baca-artikel/13455/Serba-serbi-Penggunaan-Media-Sosial-di-Instansi-Pemerintah>